

Suku Bangsa dan Ekspresi Kesukubangsaan

Hari Poerwanto

1. Pendahuluan

Jauh sebelum masa kolonial, tidak ada satu istilah kata pun yang mencakup wilayah kepulauan negara Republik Indonesia. Pada awal kedatangan Belanda untuk berdagang, kawasan ini disebut *Indie* atau India, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris *Indies*. Serupa dengan kata tersebut, muncul pula istilah lain ialah *Achter-Indie* (Hindia-Belakang) yang berbeda dengan *Voor-Indie*, (Hindia-Muka) atau India sekarang. Akan tetapi, sampai dengan abad XVII, sebutan *Achter-Indie* mencakup wilayah lebih luas dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara dewasa ini, yaitu di tambah Tibet di barat laut dan wilayah Cina Selatan di bagian timur-laut; termasuk seluruh wilayah di Laut Cina dan Teluk Bengali.

Sampai dengan akhir abad XIX, istilah yang lazim dipakai adalah *Indische Archipel* atau Kepulauan Indie. Secara resmi, baru pada 1910 seluruh wilayah daerah jajahan Belanda di Indonesia disebut dengan *Nederlandsch-Indie*. Penduduk pribumi yang berada di sana disebut dengan *Inlanders* atau bumiputera.

Bagi kaum nasionalis, istilah *Inlanders* dinilai mengandung konotasi menghina karena seolah-olah orang Jawa atau Sunda merupakan *natives* atau *aborigines* dari Negeri Belanda. Sebelum muncul kata Indonesia yang disetujui oleh kaum nasionalis, Eduard Douwes Dekker pernah mengusulkan '*Insulinde*', yaitu sebagai alternatif pengganti kata *Inlanders*, dan sebutan tersebut juga kurang dapat diterima. Akhirnya, pada 1920-an ditemukan istilah yang dapat diterima, ialah 'Indonesia'. Seiring dengan itu, muncul

juga istilah 'Nusantara'¹. Pada tahun 1919, J.J. Schrieke pernah mengatakan bahwa pemakaian kata tersebut mencerminkan kebangkitan nasionalisme Indonesia. Karenanya, banyak para pejabat pemerintah kolonial Belanda kurang senang dengan kata tersebut, antara lain karena mengandung makna pernyataan memberontak.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pertama kalinya kata Indonesia dipakai oleh Adolf Bastian dalam bukunya *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel* (1884). Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa penggunaan kata Indonesia telah terjadi sebelum itu, yaitu dipakai oleh seorang sarjana etnologi J.R. Logan dalam tulisannya "The Ethnology of the Indian Archipelago" yang dimuat dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* pada 1850. Akira Nagazumi (1976) berpendapat bahwa masalah bilamanakah dan oleh siapakah kata Indonesia pertama kalinya dipergunakan kurang begitu penting daripada implikasi penggunaan kata

¹ Nagazumi mengatakan bahwa kata 'Nusantara' yang berarti daerah ribuan pulau, pertama kali diperkenalkan dalam pidato Soekarno pada 1917 pada pembentukan *Verbond van Studeerenden* atau Serikat Mahasiswa-Mahasiswa. Agaknya istilah tersebut lebih populer dibandingkan dengan *Insulinde*. Istilah tersebut juga dipakai oleh E.F.E. Douwes Dekker atau Multatuli; demikian pula B.H.M. Viekke yang memberi judul karya sejarah Indonesiannya pada 1943 dengan kata *Nusantara* (*Nusantara: A History of the East Indian Archipelago*). Pada 1951, Armijn Pane memperluas cakupan wilayah Nusantara melampaui batas-batas negara RI sekarang. Menurut ahli kesusastraan Jawa C.C. Berg dan Theodore C.Th. Pegeaud; adalah kurang tepat memakai kata Nusantara sebagai pengganti Indonesia. Menurutnya, kata Nusantara berarti 'dunia luar' atau 'pulau-pulau lain' dilihat dari sudut pandang (orang di Pulau) Jawa.

'Indonesia' dan 'orang-orang Indonesia' dalam arti politis.

Sampai dengan menjelang akhir abad XX, identifikasi diri sebagai manusia 'Indonesia' masih tetap relevan dikaji; terutama untuk kepentingan eksistensi dari sebuah negara bangsa atau *nation state*. Berbagai kajian tentang kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia, di samping bersifat akademik, juga memiliki tujuan praktis. Secara akademik dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan salah satu manfaat praktis adalah untuk kepentingan pembangunan dalam arti luas. Karena sifat fragmentasi dari etnisitas dalam sistem kekuasaan negara bangsa, hal tersebut perlu dicermati agar suatu pola fragmentasi yang terjadi tidak menimbulkan disintegrasi bangsa. Sementara itu, pada masa penjajahan, pengetahuan mengenai suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia pernah diterapkan untuk menguasai dan mengatur anak negeri dalam rangka sistem pemerintahan kolonial. Sebaliknya, setelah kemerdekaan pengetahuan tentang keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia merupakan bahan penting guna mengupayakan terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Dengan kata lain, mengabaikan masalah kesuku bangsa akan dapat menyebabkan terjadinya kejutan dalam gejolak politik.

2. Keanekaragaman Suku Bangsa di Indonesia

Kebudayaan mengenal ruang, tempat tumbuh dan berkembang; serta mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan. Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, dan ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa yang berbeda. Pergerakan ini telah berakibat pada persebaran kebudayaan, dari masa ke masa, dan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai akibatnya, di berbagai tempat, baik pada waktu yang bersamaan maupun berlainan, dimungkinkan ditemukan unsur-unsur persamaan di samping perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, apabila suatu kebudayaan yang berada di luar masanya adalah di-

pandang ketinggalan zaman atau anakronistik, di luar tempatnya dipandang asing atau janggal.

Sebagai ciptaan dan warisan hidup bermasyarakat, kebudayaan mengenal identitas ruang dan waktu. Setelah kemerdekaan, anekawarna suku bangsa di Nusantara menjelma menjadi bangsa Indonesia. Secara *weltanschauung*, bangsa ini diikat oleh visi dan idealisme yang diharapkan mampu berfungsi sebagai sistem nilai dan institusi teras (*core*) suatu negara bangsa. Sementara itu, sebuah negara bangsa bukan hanya terwujud dalam suatu unit geopolitik semata-mata melainkan tetapi juga mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem sosial-budaya yang berasal dari anekawarna suku bangsa yang merupakan *sub national culture*.

Pada akhir-akhir ini, konflik yang berdimensi kesukubangsaan merupakan fenomena umum di banyak negara (Horowitz, 1985:3). Di samping bersifat eksplosif, adakalanya potensi konflik tersebut merupakan sesuatu yang *latent*. Melemahnya semangat integrasi yang disertai oleh menguatnya loyalitas dan solidaritas kesuku bangsa yang berdimensi politik dan etnistas tidak jarang dapat menggiring suatu bangsa yang majemuk ke dalam sikap bermusuhan di kalangan mereka. Akhirnya, kesemuanya itu akan bermuara kepada disintegrasinya suatu negara bangsa dengan tuntutan pembagian wilayah sehingga memungkinkan munculnya negara baru.

Eksistensi pluralisme suku bangsa di Indonesia, selain mencerminkan kekayaan budaya bangsa, juga membawa implikasi dalam kehidupan sosial-budaya dan bernegara. Keanekaragaman suku bangsa dan golongan di Indonesia, di samping merupakan kebanggaan, seharusnya pula disadari mengandung potensi konflik, baik bersifat *latent* maupun terbuka.

Dalam tulisannya mengenai heterogenitas politik suku bangsa di Indonesia, William Liddle (1970:4-5) mengidentifikasi ada dua jenis penghalang dalam integrasi nasional, ialah (1) yang berakar pada dimensi pembelahan horizontal, yaitu perbedaan suku bangsa, ras, agama

dan geografis; dan (2) pada tingkat vertikal berupa perbedaan latar belakang pendidikan elite kota yang berpendidikan, dan massa pedesaan yang berpandangan tradisional. Senada dengan itu, Furnivall (1948) juga mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat majemuk diasumsikan terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda sosial-budaya, tetapi mereka dipersatukan oleh sistem perekonomian simbiosis yang saling tergantung. Sekalipun di kalangan mereka terdapat perbedaan sosial-budaya: antara lain tercermin dalam bahasa, nilai-nilai, agama, dan adat-istiadat; biasanya kebersamaan mereka dalam suatu sistem politik 'dipaksakan negara' melalui polisi dan militer.

Guna menjelaskan persepsi kesuku bangsa atau etnisitas dari bangsa Indonesia, hal itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Guna memahaminya, tidak hanya sekedar didasarkan atas ruang lingkup dari suatu definisi suku bangsa ke definisi suku bangsa lainnya tanpa memahami berbagai aspek yang terkait, yang melatar belakangi, dan lingkaran permasalahannya. Karenanya, suatu upaya mengklasifikasikan penduduk di Indonesia ke dalam anekaragam suku bangsa akan selalu terbentur pada ketidaksamaan konsepsi yang dipakai.

3. Ethnic Group (Suku Bangsa) dan Kesukubangsaan (Etnisitas)

Dalam *Dictionary of Sociology* dari G. Duncan Mitchell's (1968) ternyata belum tercantum entri kata *ethnic groups*, *ethnicity*, maupun entri kata *ethnocentrism*. Demikian pula halnya dalam *Handbook of Sociology* (1941) dengan editor Edward Byron Reuter; serta *Modern Dictionary of Sociology* (1969) dari George A. dan Achilles G. Theodorson. Dalam berbagai buku tersebut, hanya ditemukan entri kata *sub group* yang pengertiannya agak mendekati arti kata *ethnic group*, ialah '... a group with a common cultural tradition and a sense of identity which exists as a subgroup of a larger society'. Sekalipun tidak juga sepenuhnya benar, pembatasan tersebut lazim dipakai dalam

konteks orang Amerika pada masa lalu, yaitu para keturunan Anglo-Saxons.

Sementara itu ada pendapat lain bahwa istilah *ethnic group* tidak dapat dipakai secara universal. Perlu kehati-hatian dalam pemakaiannya karena terdapat variasi pemahaman, seperti yang tampak pada pembatasan yang dikemukakan Melvin Tumin dalam *Dictionary of the Social Science* (1964). Ia memberikan pembatasan *ethnic group* sebagai '... a social group which, within a larger cultural and social system, claims or is accorded special status in terms of a complex of traits (ethnic traits) which it exhibits or is believed to exhibit'. Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak kalangan ilmuwan sosial cenderung mempergunakan terminologi *ethnic groups* bukan hanya untuk menunjuk *sub groups* dan minoritas semata-mata, tetapi juga untuk menunjuk semua kelompok dalam masyarakat yang berbeda kebudayaan dan keturunannya.

Keanekaragaman definisi suku bangsa atau *ethnic group* biasanya menunjukkan variasi dan merupakan kombinasi yang selalu berisikan unsur 'group', 'identity', dan 'history'. Frederik Barth (1970) berpendapat bahwa ciri terpenting dalam mengklasifikasikan seseorang dalam suatu '*ethnic group*' adalah faktor-faktor 'saling bergaul dan mempengaruhi' atau *interactive factors* karena biasanya identitas seseorang dipengaruhi oleh asal-usul dan latar belakang kebudayaan mereka. Sementara itu, Cohen (1969:4) lebih menekankan pada perbedaan adat-istiadat yang dikaitkan dengan politik.

"... an informal interest group whose members are distinct from the member of other groups within the same society in that they share ... 'compulsory institutions' like kinship and religion, and can communicate among themselves relatively easily ... between such ethnic groups ... people stress their identity and exclusiveness".

Dalam definisi Milton M. Gordon (1964:24), ada tekanan perbedaan tekanan pengertian yang diberikan, ialah "... group with a shared feeling of peoplehood". Selain itu, juga mengandung ciri

'memiliki aturan-aturan tersendiri' atau 'own way': seperti *interactive units*, *interest group*, *collectivity*, dan juga identitas (*shared feeling*, *most general identity*, *consciousness*) serta memiliki sejarah tersendiri (*peoplehood*, *presumptive origin and background*, *compulsory institutions*, *common ancestry*). Selanjutnya, Barth juga menjelaskan bahwa dalam kepustakaan antropologi, istilah *ethnic group* sering diartikan kurang jelas. Karenanya, ia mencoba memberikan pembatasan suku bangsa sebagai berikut.

"... is largely biological self-perpetuating; ... shares fundamental cultural values, realized in overt unity in cultural forms: ... make up a field of communication and interaction; ... has membership which identifies itself and identified by others, as constituting a category distinguishable from other categories of the same order".

Sementara itu, Evans-Pritchard yang dikutip Abner Cohen (1974:xiii), antara lain, mengatakan sebagai berikut.

"An ethnic group is not simply the sum of total of its individual members, and its culture is not the sum total of the strategies adopted by independent individuals. Norms, beliefs, and values are effective and have their own constraining power only because they are collective representations of that group. An individual can manipulate customs if he becomes part of such a group, adopting its current major symbols. He cannot manipulate others without being ready to be manipulated by them"².

Karenanya, Cohen juga mengatakan bahwa ruang lingkup konsep *ethnic group*

diibaratkan suatu bejana yang terorganisasi yang dapat diberikan variasi bentuk dan isi, yaitu sistem sosial-budaya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Enloe (1980:9) bahwa "An ethnic group is, at root, a collectivity whose members share a belief in common descent which is, in turn, legitimated and sustained through cultural expression".

Dalam definisi yang dikemukakan Schermerhorn (1970:12) label suku bangsa ditampilkan dengan memberikan beberapa indikator pemberi identitas seperti kesamaan leluhur, kesamaan andil dan peran kesejarahan, kesamaan fokus budaya atau satu atau lebih unsur-unsur simbolik yang dijadikan simbol kebersamaan mereka. Karena studi Schermerhorn tentang suku bangsa dilakukan di tingkat mikro ia juga mengaitkan perbedaan konsep suku bangsa dengan konsep nasionalisme, *tribalism*, *cultural pluralism*, golongan minoritas, dan sebagainya.

Agaknya, etnisitas atau *ethnicity* merupakan istilah yang relatif baru, yaitu dipakai untuk menunjuk kandungan sifat-sifat atau kualitas kesuku bangsa. Dalam *Oxford English Dictionary* (1933), istilah tersebut belum dijumpai, dan baru muncul dalam edisi yang terbit 1972. Dijelaskan, pertama kalinya istilah itu dipakai oleh David Riesman pada tahun 1953 dalam *Webster's New English Dictionary International* jilid III yang terbit pada 1961. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa istilah etnisitas tidak ditemukan dalam *Dictionary of the English* terbitan Random House 1966, dan juga tidak dijumpai dalam *American Heritage Dictionary of the English Language* 1969. Istilah itu baru muncul dalam *American Heritage Dictionary* edisi 1973: yang berarti (1) keadaan dari suatu suku bangsa; dan (2) perasaan harga diri yang dimiliki oleh suatu suku bangsa. Dari waktu ke waktu, pengertian yang terkandung dalam etnisitas selalu berubah. Menurut Glazer dan Moynihan (1976), pengertian yang pertama dirasakan lebih sesuai karena menggambarkan kondisi objektif; sedangkan keterkaitannya dengan masalah 'harga diri' adalah bersifat subjektif.

² Dalam tulisan Robert A. Le Vine dan Donald T. Campbell *Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behaviour* (1972: 43-59); Evans-Pritchard, Fortes, Colson, Gluckman dan Murphy dengan jelas telah menjelaskan bahwa pada hakikatnya ada dua tipe struktur loyalitas; ialah *pyramida-segmentary type*, dan *cross-cutting type*. Dengan demikian, meluas maupun menyempitkannya identifikasi seseorang terhadap suku bangsa dapat dipahami dengan mendasarkan tipologi tersebut.

Etnisitas memiliki dimensi komunal maupun perorangan, yaitu menunjukkan suatu ikatan khusus dari seseorang yang mengidentifikasi diri ke dalam suatu kelompok tertentu, dan ia merasa berbeda dengan kelompok lainnya (Pye, 1973). Ikatan itu lebih di dasarkan pada kesamaan kebudayaan; terutama yang dikaitkan dengan sistem kepercayaan dan nilai-nilai. Pada tingkat individual, etnisitas mengandung konotasi perasaan memiliki sesuatu, dan sekaligus menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Dalam hubungan sosial, masalah identitas suku bangsa seseorang menjadi demikian kuat dan kompleks, serta bersifat sangat pribadi.

Untuk melihat ruang lingkup konsep etnisitas, Glazer dan Moynihan (1976) memberikan contoh munculnya peristiwa disintegrasi yang akhir-akhir ini terjadi di banyak negara. Menurutnya, dalam konteks tersebut konsepsi etnisitas memiliki arti yang lebih luas dibandingkan yang terkandung dalam konsep *ethnic group*, minoritas, *sub group marginal* yang merupakan masyarakat pinggiran, berbagai golongan yang diharapkan melakukan asimilasi, kelompok orang yang akan dimusnahkan dari suatu negara; dan termasuk juga menunjuk pada kelompok-kelompok yang ingin tetap survival, yang eksotik maupun yang menyebarkan. Karena itu, etnisitas bukan hanya sekedar suatu bentuk yang melingkari individu, tetapi ia juga terkait dengan ikatan pekerjaan, daerah geografi, klas sosial, agama, jenis kelamin, umur, ras, dan ideologi. Kesemua itu tidak lepas dari pemahaman bahwa semua manusia adalah makhluk hidup yang berkebudayaan. Sementara itu, ada kecenderungan bahwa setiap individu akan mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari suatu suku bangsa tertentu (Enloe, 1973). Mengingat setiap ikatan itu adalah berbeda intensitasnya, menurut Enloe, adalah kurang tepat jika para peneliti dalam mengklasifikasikan seseorang, semata-mata, hanya cenderung mendasarkan pada atribut yang dipakai. Mengingat hal itu maka selain ditentukan oleh identifikasi diri seseorang, seringkali suatu etnisitas tidak di dasarkan atas ka-

tegorisasi objektif, tetapi lebih didasarkan atas persepsi orang lain.

Di negara yang jumlah komunitas suku bangsanya sangat berlimpah, terdapat berbagai spektrum perbedaan etnisitas, dari yang tampak sampai dengan yang tak tampak. Dalam situasi seperti itu akan timbul beberapa variasi sistem hubungan antarsuku bangsa. Dalam konteks politik dalam suatu negara, ada tiga *level* perbedaan kesuku bangsa; terutama jika dikaitkan dengan asal-usul dan perbedaan identitas; ialah *tribal*, *nationality*, dan *racial*. Sementara itu, kemajemukan suku bangsa di suatu negara dapat pula dipandang dari intensitas dan kualitas etnisitas. Derajat intensitas tersebut bukan hanya sekedar menunjuk pada adanya perbedaan suku bangsa semata-mata melainkan juga berkaitan dengan sistem kepercayaan dan sistem nilai mereka. Karena itu, dalam rangka suatu proses *nation-building*, pluralitas suku bangsa merupakan masalah yang rumit karena masing-masing saling memiliki perbedaan unsur-unsur kebudayaan. Akibatnya timbul permasalahan, misalnya menyangkut pemberian identitas negara; apakah didasarkan atas suatu agama ataupun sistem nilai budaya tertentu.

Setelah dua puluh lima tahun terbitnya buku *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*; semakin banyak orang menyadari dan tertarik untuk membahas isu tentang kesuku bangsa (Barth, 1994:10). Ia menyadari bahwa amat sulit baginya untuk membuat suatu inovasi tentang hal-hal yang pernah ditulisnya. Jikalau dapat, tentunya hal itu harus dicarinya pada lapangan studi yang baru, tempat yang baru, dan dengan topik yang juga baru. Bagi Barth, kesemuanya itu "*That is not so easily done when you return to familiar ground*".

Pandangan Barth seperti itu dikemukakan untuk menjawab kritik yang ditujukan kepadanya, antara lain, datang dari Katherine Verdery (1994:33-35). Menurut Katherine Verdery, tanpa mengurangi rasa hormat dan mengecikan arti karya Barth, setelah dua puluh lima tahun kemudian, karya monumental Barth dinilai *outdated*, dan semua itu merupakan hal biasa

dalam ilmu-ilmu sosial. Aada tiga masalah pokok kelemahan dalam karya Barth tersebut. Pertama, pemahamannya tentang etnisitas tidak berpangkal dari analisis kebudayaan. Etnisitas lebih dianggapnya sebagai suatu bentuk organisasi sosial "..... as an organizing cultural different. Kedua, akar permasalahan dari organisasi tersebut tidak dikaitkan dalam konteks budaya. Identitas kesuku bangsa lebih dianggap merupakan realitas dari dikhotomisasi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman ruang lingkup. Ketiga, identifikasi kesuku bangsa lebih didasarkan *ascription* dan *self-ascription* daripada *'possessing a certain cultural inventory'*. Akibatnya, dalam analisisnya akan dimungkinkan terjadinya manipulasi karakteristik identitas yang situasional. Menyadari hal tersebut, kemudian ia antara lain mengusulkan pentingnya menganalisis berbagai proses dikotomisasi dalam masyarakat. Sementara itu, dalam wacana kesuku bangsa, dikotomisasi perbedaan kebudayaan akan selalu berlangsung dengan cepat. Karena itu, diperlukan tiga *level* analisis, yaitu di tingkat mikro, median, dan makro.

Jika dikaji lebih lanjut, selama ini berbagai konsepsi *ethnic-group* lebih merupakan suatu konsep budaya (Knutsson, 1970:98). Berbagai variasi pembatasan konsep suku bangsa juga tergantung pada dari sudut manakah kebudayaan itu didefinisikan. Semakin beranekarwarnanya suku bangsa di suatu negara, semakin banyak terdapat variasi perbedaan kebudayaan. Karenanya, jika konsepsi etnisitas hanya mendasarkan ruang lingkup pembatasan suku bangsa semata-mata, tidak akan cukup memadai untuk dipakai dalam menganalisis etnisitas. Berbagai perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh suku-suku bangsa tidak selalu dapat dianggap sebagai fenomena etnisitas sepanjang tidak terjadi efektivitas relasi yang mencerminkan suatu derajat integrasi sosial. Dengan kata lain, bahwa fenomena utama dari masalah etnisitas, atau dianggap sebagai masalah kesuku bangsa apabila interrelasi mereka cukup rendah. Karena itulah, Epstein (1978:93) cenderung menilai bahwa

etnisitas lebih merupakan konsep politik daripada konsep kebudayaan, "..... *ethnicity is essentially a political phenomenon, involving a struggle for power among ethnic groups in furtherance and defence of their collective interest*". Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam konsepsi etnisitas terkandung hal-hal sebagai berikut.

"... *it various interactional contexts, or dichotomization are part of the individual's or group strategies for preserving or increasing control of resources, social status or other value a meaningful interpretation feasible; ... Ethnicity becomes not one single universally applicable term but rather the representation of a wide range of interrelation in which the dominant reference is to an ethnic status ascribed on the basis of birth, language, and socialization*".

Sementara itu, Cohen (1969) juga berpendapat serupa, bahwasanya politisasi hubungan antarsuku bangsa merupakan suatu perjuangan dari suku-suku bangsa tertentu untuk mendapatkan *power* dan *priviledges*, dengan memanfaatkan *cultural tradition* sebagai senjata perjuangannya.

Diakui oleh Glazer dan Moynihan (1976:5) bahwa identifikasi diri yang didasarkan atas realitas sosial seperti agama atau kepercayaan, bahasa dan suku bangsa secara bersamaan dapat membentuk etnisitas atau diberi label etnisitas. Berbagai konflik antarsuku bangsa yang terjadi, terutama antara 'minoritas' dan 'mayoritas', biasanya didasarkan atas tuntutan mengenai pengakuan akan prestise, kehormatan, hak-hak penduduk, kekuasaan politik, serta akses terhadap peluang ekonomi.

Kajian epistemologis yang dilakukan Mitchell (1974:1), antara lain mengungkapkannya sebagai berikut.

"*I wish to distinguish first between ethnicity as a construct of perceptual or cognitive phenomena on the one hand, and the ethnic group a construct of behavioural phenomena on the other; and second between common-*

sense notions and analytical notions of ethnicity".

Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa dalam rangka mengeksploitasi masalah etnisitas, penting dibedakannya antara etnisitas sebagai konsep struktural dan etnisitas sebagai konsep kultural.

Etnisitas sebagai konsep struktural menunjuk pada suatu atribut abstrak dari para aktor, misalnya melalui pemahaman umum atau penjelasan tentang tingkah laku mereka; kemudian menempatkannya sebagai anggota suatu suku bangsa tertentu. Sebagai langkah berikutnya adalah memberikan penilaian bagaimana-nakah situasinya dan di manakah aktor tersebut ditempatkan. Sebaliknya, etnisitas sebagai konsep kultural dapat dijelaskan sebagai suatu gejala kebudayaan mengenai bagaimanakah para aktor tersebut menyusun pengalamannya sendiri. Dalam hal ini, konteks etnisitas dipakai untuk lebih memahami suatu ekspresi bersama dari suatu suku bangsa tertentu, yaitu sebagai pencerminan sikap oposisi mereka terhadap suku bangsa lain yang memiliki sikap dasar yang berbeda (Michell, 1974:15-16). Karenanya, dimensi etnisitas dapat pula dimanfaatkan untuk pembentukan atau konsolidasi politik dalam suatu negara bangsa. Dalam konteks tersebut, diasumsikan bahwa etnisitas dapat terbentuk melalui kondisi kognitif atau melalui suatu fenomena kebudayaan tertentu, yang dapat mengarahkan para aktor membangun hubungan di antara mereka atau antar suku bangsa.

Dalam suatu masyarakat majemuk, umumnya fenomena etnisitas bersifat *latent*, yang disebabkan oleh terlampau lamanya *primordial sentiment* tersumbat. Jika hal itu terjadi, yang muncul ke permukaan adalah lebih berupa fenomena etnisitas. Mengingat hal itu, pihak yang dirugikan akan memilihnya sebagai model strategi politik, yaitu dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Berbagai kandungan dimensi politik dalam etnisitas juga diungkapkan oleh Das Gupta (1976:469) berikut di bawah ini.

"This is not to say that the politics of ethnicity should be judged exclusively in terms of the norm of integration. There other competing value in politics that may be equally relevant, such as autonomy, authority, liberty, productivity, justice, and the like. However, we have stressed here the case of integration because most of the recent discoveries of the importance of ethnicity in the social sciences have been obsessed by an equation implying that ethnicity is primordial, and that primordial divisions are politically disintegrative in consequence".

Mengingat hal tersebut, sebagai langkah awal untuk mengantisipasi gejolak kesukubangsaan, Cynthia Enloe (1980: 15-16) menganjurkan suatu model pemetaan³. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa etnisitas lebih merupakan fenomena kolektif daripada peorangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh para elit politik untuk membangun strategi keamanan negara. Oleh karena etnisitas juga merupakan ekspresi kultural akan lebih didasarkan pada sistem nilai daripada minat. Di samping itu, etnisitas juga dapat lebih bersifat emosional. Jika demikian, dapat pula dianggap merupakan tipologi identitas yang di dasarkan pada persamaan persepsi dan pengalaman masa lalu. Selanjutnya, etnisitas juga merupakan suatu konsep berpikir. Dalam konteks ini, sekalipun tidak semua kasus etnisitas memiliki dimensi internasional yang mampu melintas batas-batas negara, para elit politik tetap harus mampu membuat prediksi mengenai bagaimana sikap dan perilaku suatu suku bangsa terhadap negara lain. Ini berarti bahwa apabila hal ini dapat

³ Lebih lanjut Enloe mengemukakan bahwa pemetaan itu antara lain meliputi: (1) Suku bangsa yang dikategorikan sangat 'peka', dan biasanya bermukim di daerah-daerah perbatasan; (2) berbagai suku bangsa yang berperan dalam perekonomian; antara lain karena biasanya memiliki hak-hak istimewa; (3) suku bangsa yang memiliki potensi mengubah tatanan politik yang ada; (4) suku bangsa yang memiliki potensi bersaing dengan negara asing; (4) suku bangsa yang memiliki potensi bersaing dengan negara asing; dan (5) suku bangsa yang memiliki akses terbesar dalam struktur yang telah terpolo di negaranya.

dicermati, etnisitas dapat dipakai untuk basis peta keamanan suatu negara.

Etnisitas juga merupakan salah satu bentuk ideologi tertentu. Geertz (1964) mendefinisikan ideologi sebagai salah satu dari sistem budaya seperti halnya kepercayaan, filsafat, estetika, dan hukum. Ideologi merupakan *image* yang skematik dari suatu *social order* karena pada dasarnya manusia adalah *a political animal*. Menurut Geertz, etnisitas dapat pula dipandang sebagai "sistem simbol... merupakan suara hati nurani kolektif". Jika ideologi adalah sistem budaya, secara logik etnisitas lebih merupakan subordinat dari kepercayaan, dan bukan koordinat. Sebagai contoh bahwa etnisitas sebagai salah satu bentuk ideologi, misalnya, ungkapan 'sekali Jahudi tetap Jahudi'.

4. Indonesia Sebagai Identitas Negara Bangsa

Dalam konteks revolusi integratif suatu negara bangsa, ada dua kekuatan utama yang saling bersaing, ialah *primordial sentiment* dan kesadaran *civil politics* (Geertz, 1965). Revolusi integratif adalah 'berhimpunnya berbagai kelompok primordial-tradisional ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar dan bersifat menyebar. Sebelumnya, berbagai kelompok itu berdiri sendiri-sendiri, dan kemudian harus memiliki suatu kerangka acuan dalam lingkup 'bangsa' di bawah perlindungan suatu pemerintahan baru. Untuk itu, perlu pemahaman terhadap unsur-unsur kesuku bangsa dan ras dalam sistem perekonomian dan politik, terutama dinamika ikatan *primordial* secara historis dalam konteks sistem politik dan perekonomian berbagai suku bangsa. Karena itu, kata Indonesia dapat dinilai mengekspresikan identitas suatu negara bangsa, baik politik maupun budaya.

Sementara itu, *agak*nya disepakati bahwa fokus utama kajian etnisitas adalah dikaitkan dengan masalah identitas, terutama yang dikaitkan dengan solidaritas dan loyalitas seseorang sebagai anggota. Untuk memahami berbagai permasalahan yang ada, Parsons (1976) juga menganjurkan mengaitkannya de-

ngan latar belakang sejarah. Hal tersebut penting artinya, apalagi hal itu dihubungkan dengan konsepsi ideal penduduk dalam sebuah negara. Sebuah *nation state* menurut Hans Kohn yang dikutip oleh Talcott Parsons, adalah "... *a politically organized society which historically enjoyed a legitimated claim to independence*".

Studi tentang etnisitas suatu hal penting bagi negara dengan penduduk plural, yaitu agar keanekaragaman suku bangsa dapat dikembangkan sebagai strategi nasional ke arah terwujudnya integrasi nasional. Dalam konteks tersebut, nasionalisme yang seharusnya dikembangkan tentunya membutuhkan saling pengakuan loyalitas dan solidaritas di antara kebudayaan yang berbeda, seperti dikemukakan oleh Ernest Gellner (1984:6). Kriteria suatu integrasi nasional sebaiknya:

"(1) *Two men are of the same nation if and only if they share the same culture, where culture in turn means a system of ideas and sign and associations and way of behaving and communicating; (2) Two men of the same nations if and only if they recognize each other as belonging to the same nation. In other words, nations make the man, nation are the artefacts of men's convictions and loyalties and solidarities.*

Untuk menuju bagian dari masyarakat yang lebih luas, misalnya sebagai satu *nation state*, pada dasarnya ada tiga masalah pokok yang dibahas dalam etnisitas. Pertama, garis pembatas pada masa lalu, misalnya religi, bahasa, dan afiliasi politik, yang masih potensial bagi munculnya konflik. Kedua, apa dan bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk konflik baru di kalangan mereka, termasuk konflik di antara suku bangsa 'mayoritas' dan 'minoritas'. Apakah mereka saling bertikai disebabkan oleh kebutuhan akan penghargaan (*prestige*), perhormatan (*respect*), hak-hak sipil (*civil rights*), kekuasaan politik (*political power*), ataukah akses terhadap perekonomian (*access to economic opportunity*). Ketiga, studi ten-

tang etnisitas tidak hanya sekedar dikaitkan dengan masalah mengejar sesuatu kesempatan semata-mata tetapi juga berkaitan dengan suatu ideologi dan kepentingan tertentu. Karenanya, kehadiran suatu etnisitas merupakan pula ceminan revivalisme identitas suatu suku bangsa yang sering disebut pula sebagai '*primordialism*'. Identitas yang mendasar dari suatu suku bangsa tadi oleh C. Geertz disebut dengan '*primordial affinities and attachments*', yang dimiliki seseorang sejak lahir atau dimiliki karena kelahirannya (*ascribed*), seperti kesamaan hubungan kekerabatan dan pertalian darah, kelahiran, bahasa, dan merupakan *candidate for nationhood*'.

Ikatan primordial berlawanan dengan kesadaran kewarganegaraan (*civil sense*). Dalam konsep kesadaran kewarganegaraan terkandung gagasan mengenai kepentingan publik yang seringkali bertolak belakang dengan kepentingan pribadi. Atas dasar itu maka muncullah perilaku politik modern rasional yang lebih menekankan pada kepentingan umum. Karenanya, dalam suatu revolusi integratif, terjadilah suatu proses ketika kelompok *primordial* bergerak berubah dari lingkup lokal ke supra lokal (*nation state*), yaitu ke arah kesatuan politik yang lebih besar dan lebih kompleks perorganisasiannya. Berbagai kesatuan politik yang sebelumnya berskala kecil dan memiliki otonomi yang relatif bersifat *primordial* serta *integrated* harus berubah ke arah kesatuan politik baru yang memiliki ciri yang berbeda, yaitu yang memisahkan antara kepentingan umum dan pribadi, dan berbeda dengan ciri politik *primordial*. Sebagai akibatnya akan terjadi ketegangan antara sistem politik kenegaraan (*civil politics*) dengan sistem politik *primordial*; atau terjadinya suatu proses integratif. Akibat dari semua itu, muncul pula sesuatu yang dipertentangkan; di satu pihak ingin tetap mempertahankan identitas, terikat pada pertalian darah, tempat tinggal, agama dan tradisi; sementara itu ada tuntutan praktis akan kemajuan, antara lain dimilikinya orde politik yang lebih efektif dan meningkatkan taraf kehidupan. Jika kedua hal itu muncul bersamaan, dalam pengalaman

negara-negara yang baru merdeka, dalam penyelesaian ketegangan tersebut akan diwamai politik *primordial* seperti ekstrim kedaerahan, rasialisme, dan komunalisme. Jika ini terjadi, tidak jarang akan memunculkan suatu sistem nasional yang terdiri dari 'kubu-kubu suku bangsa' dalam wujud hadimya suatu jaringan persekutuan dan persaingan yang dilandasi sentimen rasa bangga dan saling curiga-mencurigai. Biasanya, sumber ketegangan berupa pemaksaan kehidupan politik pemerintahan (*civil politics*) 'modern' terhadap politik *primordial*; sementara itu logika politik *primordial* dianggap tidak rasional.

Karena itu semua, studi etnisitas juga sering dikaitkan dengan suatu derajat konformitas dalam proses interaksi sosial kolektivitas sosial tertentu, terutama dalam hal menerima norma-norma tertentu. Mitchell (1956), Epstein (1958), Gluckman (1961) dan Barth (1969) sering mengaitkan studi mengenai etnisitas dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dari suatu kolektivitas tertentu, terutama yang bersifat mendasar seperti *primordial*. Ada kecenderungan bahwa dalam suatu proses interaksi sosial, seseorang mengidentifikasi dirinya dengan suku bangsa tertentu karena pihak lain pun juga dianggapnya perilakunya terkait dengan latar belakang kesuku bangsanya.

Daftar Pustaka

- Allport, Gordon W., 1951, *The Nature of Prejudice*, Boston, Beacon Press.
- Allport, Gordon W., 1954, "The Problem of Prejudice", *Racial and Ethnic Relations - Selected Readings*, Bernard E. Segal (ed.), New York, Thomas Y. Crowell Company, Hlm. 5-53.
- Aronson, Dan R., 1976, "Ethnicity as a Cultural System: An Introductory Essay", dalam *World Anthropology*, Sol Tax (ed.), Chicago, The Hague, Mouton Publishers. Hlm. 9-19.
- Barth, Frederik, 1970, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, London, George Allen.

- Barth, Frederik, 1994, "Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity", dalam *The Anthropology of Ethnicity: Beyond Ethnic Groups and Boundaries*, Hans Vermeulen dan Cora Govers (ed.), Amsterdam, Het Spinhuis Publisher, Hlm. 11-32.
- Blalock, Hurbert M., 1967, *Toward a Theory of Minority Group Relations*, New York, John Wiley and Sons Inc.
- Bohanan, Paul dan Fred Flag (ed.), 1967, *Beyond The Frontier*, New York, The Natural History Press.
- Cohen, Abner (ed.), 1974, *Urban Ethnicity*, Tavistock Publications, London-New York.
- Crow, Lester D. dan Alice Crow, 1959, *General Psychology*, New Jersey, Littlefield Adam & Co, Hlm. 93-95
- Das Gupta, Jyotirindra, 1978, "Etnicity, Language Demands, and National Development in India, dalam *Ethnicity: Theory and Experience*, Glazer, Nathan dan Daniel P. Moynihan (ed.), Massachusetts, Harvard University Press, Hlm. 466-488.
- Enloe, Cynthia H., 1973, *Ethnic Conflict and Political Development*, Boston, Little Brown and Company.
- Epstein, A.L., 1978, *Ethos and Identity: Three Studies in Ethnicity*, London, Tavistock Publication.
- Frazier, E.Franklin, 1957, *Race and Culture Contacts in the Modern World*, Boston, Beacon Press.
- Geertz, Clifford, 1964, "Ideology as a Cultural System", dalam *Ideology and Discontent*, David Apter (ed.), New York, The Free Press, Hlm.47-76.
- Geertz, Clifford, 1965, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiment and Civil Politics in the New States", *Old Societies and New States*, C.Geertz (ed.), New York, The Free Press, Hlm.105-107.
- Gellner, Ernest, 1984, *Nations and Nationalism*, Basil Blackwell.
- Gillin, J.L. dan J.P.Gillin, 1954, *Cultural Sociology*, New York, The Mc Millan Company.
- Glazer, Nathan dan Daniel P.Moynihan, 1976, *Ethnicity: Theory and Experience*, Massachusetts, Harvard University Press.
- Gordon, Milton M., 1964, *Assimilation in American Life*, Oxford University Press, New York.
- Gordon, Milton M., 1976, "Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relations", dalam *Ethnicity: Theory and Experience*, Glazer, Nathan dan Daniel P. Moynihan (ed.), Massachusetts, Harvard University Press, Hlm. 84-110.
- Herkovits, Melville J., 1958, *Acculturation: The Study of Culture Contact*, New York, Peter Smith.
- Knutsson, Karl Eric, 1970, "Dichotomization and Integration" dalam Frederik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, London, George Allen, Hlm.86-100.
- Koentjaraningrat, 1993, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- LeVine, Robert A. dan Donald T.Cambell, 1972, *Ethnoentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behavior*, New York, John Wiley & Son Inc.
- Liddle, William R., 1970, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven, Yale University Press.
- Linton, Ralph (ed.), 1945, *The Science of Man in the World Crisis*, New York, Columbia University Press.
- Martin, James G and Clyde W.Franklin, 1973, *Minority Group Relations*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.
- Michell, J.C., 1974, "Perceptions of Etnicity and Ethnic Behavior: An Emperical Exploration", dalam *Urban Ethnicity*, Cohen, Abner (ed.), Tavistock Publications, London-New York, Hlm.1-36..
- Mitchell's, G.Ducan, 1968, *Dictionary of Sociology*, Chicago, Aldine, 1968.

- Nagazumi, Akira, 1976, "'Indonesia' dan 'Orang-Orang Indonesia' dalam Indonesia: Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai, Ichimura dan Koentjaraningrat (ed.), Jakarta, PT Gramedia, Hlm.1-26.
- Parsons, Talcott, 1975, "Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity", dalam *Ethnicity: Theory and Experience*, Nathan Glazer dan Daniel P. Moynihan, Massachusetts, Harvard University Press, Hlm. 53-83.
- Pye, Lucian W., Gabriel A. Almond dan James S. Coleman, 1973, *Ethnic Conflict and Political Development*, Canada, Little Brown & Company.
- Reuter, Edward Byron (ed.), 1941, *Handbook of Sociology*, New York, Dryden Press, 1941.
- Schermerhorn, R.A., 1970, *Comparative Ethnic Relations: A Framework of Theory and Research*, New York, Random House.
- Shibutani T., Kian M. Kwan, *Ethnic Stratification: A Comparative Approach*, The MacMillan Company, London, 1969.
- Simpson, George E. dan J. Milton Yinger, 1972, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, New York, Harper and Row Publisher.
- Swartz, Marc J, Victor W. Turner dan Arthur Tuden, 1966, *Political Anthropology*, Chicago, Aldine Publishing Company.
- Theodorson, Achilles G. dan George A., 1969, *Modern Dictionary of Sociology*, New York, Thomas Y. Crowell.
- Toit, Brian M. du (ed.), 1978, *Ethnicity in Modern Africa*, Westview Press, Colorado.
- Tumin, Melvin, 1964, *Dictionary of the Social Science*, New York, The Free Press of Glencoe-MacMillan.
- Verdery, Katherine, 1994, "Ethnicity, Nasionalism, and State-Making", dalam *The Anthropology of Ethnicity: Beyond Ethnic Groups and Boundaries*, Hans Vermeulen dan Cora Govers (ed.), Amsterdam, Het Spinhuis Publisher, Hlm.33-58.
- Wirth, Louis, 1945, "The Problem of Minority Groups", *The Science of Man in the World Crisis*, R. Linton (ed.), New York, Columbia University Press, Hlm.347-372.